

DAFTAR PUSTAKA

- , 2019, *Profil DPRD Kota Pekalongan masa Keanggotaan Tahun 2019-2024*, Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.
- Alsarayreh M.N., Jawabreh O.A., Jaradat M.F., and Alamro S.A., 2011. *Technological Impact on Effectiveness of Accounting Information System (AIS) Applied by Aqaba Tourist Hotels*. European Journal of Scientific Research, 59(3), pp: 361-369.
- Basir, 2017, *Dinamika Pemilu Legislatif Kota Pekalongan dari Masa ke Masa, Kota Pekalongan*, Diskominfo Kota Pekalongan.
- Gelinas, U. J., & Dull, R. B. 2008. *Accounting Information Systems* (edisi ke-7). Thomson South-Western.
- Giyarti Arif, *Pengembangan Sistem Informasi Penggajian Pegawai Pada Puslitbang Sda Balai Sabo Yogyakarta*, Jurnal STMIK AMIKOM Yogyakarta.
- Mangifera, L 2015. *Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Pada Produk Batik Tulis Di Surakarta, Benefit, Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol.19, No.1, 24-33.
- Mulyadi, 2016, *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2017). *Accounting Information System 14th Edition*. Arizona: Pearson.
- Syamsul, Afif, 2012, *Sistem Informasi Penggajian Pegawai Pada MTs Nurul Ittihad Tekung Lumajang*, Jurnal Politeknik Negeri Jember.
- Widarjanto. 2021. Rincian Gaji Anggota DPRD. (Syaifudin I, Pewawancara)
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 17 Tahun 2017 tentang *Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode Etik DPRD, JDIH DPRD Kota Pekalongan.

Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan*.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2010 tentang *Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan ANggorta DPRD Kota Pekalongan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Undang-Undang No. 19 Tahun 1956 tentang *Pemilihan Anggota DPRD*.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.